

Analisis kebijakan dalam proses transformasi RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari unit swadana menuju badan layanan umum tahun 2007

Katibi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332721&lokasi=lokal>

Abstrak

Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mencmbri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeioloan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tersebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jati Kota Cirebon beium menerapkan pola pengeioloan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).

Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeioloan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implernctasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcnprogram secara sistematis. Secara substanolif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Cirebon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).

Tetapi, persyaratan administratif yang dipclrukan untuk penerapan pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mcngungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang mcjadi persyaratan administratif di atas, yang dipclrukan dalam pcngelolaan kcuangan badan layanan umum seperti tarif layanan yang berdasarkan pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pcngelolaan keuangan yang khas pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pcngelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pcngawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang dipclrukan dalam pcngelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarnya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cempat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumber daya ; penyiapan persyaratan administratif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang dipclrukan untuk implemcnclasi pcngelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati.

Untuk itu sebagai saran dari penclilian ini adalah sambil mcnunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan

dan teknis tentang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat perencanaan kegiatan (POA : plan of activity atas empat kegiatan yang meliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implementasi kebijakan, penyiapan persyaratan administratif dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan BLU secara sistematis, efektif dan efisien.

.....To settled the government's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattern of Finance Management of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattern of finance management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of finance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital's benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specified commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum".

This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattern of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area.

Research result indicate that policy communication about pattern of finance management of 'Badan layanan umum' is ineffective activity, resources preparation to implement the policy isn't plan and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati.

Further, from this research result also lay open that technical policies, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum' like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund investment; management of finance which typical pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished.

This research explain that the inchoate of technical policies which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of patterns of finance management of BLUD).

As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gunung Jati not yet is optimal and unfinished. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solve the four's policy problem.